

**REKRUTMEN CALON ANGGOTA LEGISLATIF PARTAI Keadilan
Sejahtera Kota Pekanbaru pada Pemilihan Legislatif
Tahun 2019**

Rizki Affandi

Email : rizkiaffandi97@gmail.com

Pembimbing: Dr. Hasanuddin, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

This Skripsi discusses the system and mechanism of recruitment of candidates for legislative members conducted by PKS. The purpose of this study was to determine the recruitment carried out by PKS in recruiting candidates for legislative members. This research uses a qualitative method with a descriptive analysis case study. Data collection techniques used through interviews as primary data and literature study as secondary data.

The theoretical concept used by researchers is Political Recruitment which has an indicator of the tendency of political parties to recruit, namely, Partisans, Compartmentalization, Immediate Survival, and Civil Service Reform. This research uses qualitative research methods, with descriptive data review. In collecting data, researchers used interview and documentation techniques.

The results of this study indicate that, based on findings in the field, the recruitment of Candidates for PKS Legislative Members in Pekanbaru in the 2019 legislative elections was more dominant using the partisan type and Civil Service Reform in carrying out the process of recruiting prospective Legislative Members. This strengthens the process that is already running internally within PKS. and the Compartmentalization type only supports the determination of prospective candidates and is considered by the party. But there are also factors that influence the recruitment of PKS legislative candidates, namely as supporting factors in recruitment are background, political experience, and financial. While the inhibiting factors are occupation, domicile of prospective candidates, and representation of women. It can be concluded that the recruitment of PKS Legislative Candidates can be said to have been good. So as to be able to produce qualified cadres and sympathizers to be candidates for legislative members.

Keywords: Political Parties, Political Recruitment, Legislative Elections

A. PENDAHULUAN

Partai politik merupakan salah satu institusi dari pelaksanaan demokrasi modern. Demokrasi modern menginginkan sebuah sistem dimana yang disebut keterwakilan, baik keterwakilan dalam lembaga-lembaga formal seperti parlemen maupun keterwakilan aspirasi masyarakat dalam institusi kepartaian. Partai politik memiliki beberapa fungsi seperti sarana komunikasi politik, sarana sosialisasi politik, sarana rekrutmen politik, dan sarana pengatur konflik.

Sedangkan menurut Undang-Undang nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik, pasal 1 menyebutkan partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹

Selanjutnya fungsi rekrutmen sebagai salah satu dari bagian fungsi partai politik yang sangat penting. Salah satu fungsi partai politik adalah melakukan rekrutmen politik, yaitu merekrut orang-orang untuk menjadi anggota partai dan aktif dalam aktivitas partai, serta menyeleksi Partai politik berpedoman pada landasan hukum yaitu, Undang-Undang Nomor

2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang mana undang-undang tersebut merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Di Indonesia, partai politik melakukan rekrutmen politik bagi warga negara Indonesia untuk pengisian jabatan politik seperti anggota partai politik, bakal calon anggota dewan perwakilan rakyat tingkat pusat maupun daerah, bakal calon presiden dan wakil presiden, serta bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Kemudian dalam perekrutan tersebut harus dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai politik tersebut.²

Ada dua macam pola rekrutmen politik, yaitu rekrutmen terbuka dan rekrutmen yang tertutup. Dalam rekrutmen terbuka, syarat dan prosedur untuk menampilkan seseorang tokoh dapat diketahui secara luas. Dalam hal ini partai politik berfungsi sebagai alat bagi elit politik yang berkualitas untuk mendapatkan dukungan masyarakat. Sedangkan dalam rekrutmen tertutup, syarat dan prosedur pencalonan tidak dapat secara bebas diketahui umum. Partai berkedudukan sebagai promotor elit yang berasal dari dalam tubuh partai itu sendiri.³

² Pasal 29, Ayat 1 UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik

³ Okky Singgih Laksono Waskita Aji, Hasyim Asy'ari, Lita Tyesta A.L.W, *Optimalisasi Tata Cara Partai Politik Dalam Rekrutmen Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Untuk Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012*. (Diponegoro Law Journal Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016), hlm. 5

¹ Pasal 1, Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

Partai Keadilan Sejahtera Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan rekrutmen calon anggota legislatif untuk pemilu 2019 menggunakan sistem rekrutmen terbuka, karena semua masyarakat yang memenuhi syarat dapat dipilih sebagai bakal calon anggota legislatif. Masyarakat tersebut tidak dapat mendaftar secara pribadi ke Partai Keadilan Sejahtera,

namun kader dari setiap daerah pemilihan akan melakukan pencarian di wilayahnya, dalam artian seluruh masyarakat tidak memiliki hak untuk mendaftar sebagai calon anggota legislaif. Berikut data yang di peroleh dari Kantor Dewan Pimpinan Daerah Partai Keadilan Sejahtera sebagai rujukan dalam penelitian ini:

Tabel 1.1
Bakal calon anggota legislatif yang diusulkan pada pemilu legislatif tahun 2019 di tingkat DPD PKS Kota Pekanbaru

No	Bakal Calon	Laki-Laki	Perempuan	Keseluruhan
1.	Internal	54	18	72
2.	Eksternal	10	8	18
Jumlah		64	26	90

Sumber: DPD PKS Kota Pekanbaru 2019

Dari tabel 1.1 di atas, jumlah keseluruhan bakal calon yang diusulkan adalah 90 orang yang terdiri dari internal 72 orang dan eksternal 18 orang, dimana semua bakal calon eksternal baik laki-laki maupun

perempuan lolos menjadi calon anggota legislatif Partai Keadilan Sejahtera untuk pemilu legislatif tahun 2019.

Tabel 1.2
Perbandingan jumlah calon anggota legislatif internal dan eksternal Partai Keadilan Sejahtera pada pemilihan legislatif tahun 2014 dan 2019

No	Tahun	Int/Eks	D1	D2	D3	D4	D5	D6	Jumlah	Persentase
1.	2014 (45 Caleg)	Internal	8	6	6	10	10	-	40	88,9%
		Eksternal	1	0	1	1	2	-	5	11,1%

2.	2019 (44 Caleg)	Internal	2	5	3	7	6	3	26	59,1%
		Eksternal	4	2	4	3	2	3	18	40,9%

Sumber: Kantor DPD PKS Kota Pekanbaru 2019

Berdasarkan tabel 1.2 di atas, diketahui bahwa pada pemilihan legislatif tahun 2014, Partai Keadilan Sejahtera hanya mengusung 5 calon anggota legislatif eksternal partai, dan 40 calon anggota legislatif internal partai, dengan persentase calon anggota legislatif eksternal 11,1%, dan calon anggota legislatif internal 88,9%. Berarti Partai Keadilan Sejahtera masih bisa dikatakan sebagai partai yang memfokuskan kader internal sebagai calon anggota legislatifnya untuk tahun 2014.

Namun untuk pemilihan legislatif tahun 2019, Partai Keadilan Sejahtera mengusung 18 calon anggota legislatif eksternal partai, dan 26 calon anggota legislatif internal partai, dengan persentase calon anggota legislatif eksternal 40,9% dan calon anggota legislatif internal 59,1%. Hal ini merupakan suatu perubahan dimana Partai Keadilan Sejahtera yang sudah mendeklarasikan dirinya sebagai partai kaderisasi memiliki kebijakan baru dalam merekrut calon anggota legislatifnya, terutama meningkatnya calon anggota legislatif yang diusung dari eksternal partai.

Adapun identifikasi masalah yang penulis temui berdasarkan fenomena diatas adalah:

1. Untuk pemilihan legislatif tahun 2019, Partai Keadilan Sejahtera mengusung 40,9% calon anggota legislatif dari non-kader, padahal

sebelumnya Partai Keadilan Sejahtera mendeklarasikan dirinya sebagai partai kader yang memiliki sistem kaderisasi. Kaderisasi ini memiliki fungsi rekrutmen calon anggota dan fungsi pembinaan untuk seluruh anggota, kader dan fungsionaris partai. Namun, dengan semakin kuatnya persaingan antar partai dalam perolehan suara, Partai Keadilan Sejahtera untuk pemilihan legislatif tahun 2019 ini tentu telah memiliki persiapan yang matang. Maka perlu diketahui bagaimana rekrutmen yang dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera pada pemilihan legislatif tahun 2019.

2. Partai Keadilan Sejahtera Kota Pekanbaru pada tingkat daerah, masih mengalami kekurangan kader (internal) partai yang memang benar-benar siap bersaing dengan bakal calon anggota legislatif dari non-kader. Ini dibuktikan dengan meningkatnya calon anggota legislatif dari non-kader sebanyak 18 orang atau 40,9% dari kuota yang ditetapkan. Hal ini yang ingin penulis ketahui, bagaimana proses rekrutmen yang dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera dalam rekrutmen calon anggota legislatifnya.

Melihat dari uraian di atas, maka hal inilah yang menarik minat penulis untuk meneliti dan mempelajari lebih jauh bagaimana rekrutmen yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kota Pekanbaru dalam merekrut calon anggota legislatif pada pemilihan legislatif tahun 2019. Untuk itulah penulis mencoba mengangkat permasalahan ini kedalam penelitian yang berjudul ***“Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Partai Keadilan Sejahtera Kota Pekanbaru Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2019”***

Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana rekrutmen Calon Anggota Legislatif Partai Keadilan Sejahtera Kota Pekanbaru pada pemilihan legislatif tahun 2019?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi rekrutmen Calon Anggota Legislatif Partai Keadilan Sejahtera Kota Pekanbaru pada pemilihan legislatif tahun 2019?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui rekrutmen Calon Anggota Legislatif Partai Keadilan Sejahtera Kota Pekanbaru pada pemilihan legislatif tahun 2019.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi rekrutmen Calon Anggota Legislatif Partai Keadilan Sejahtera Kota Pekanbaru pada pemilihan legislatif tahun 2019.

Kerangka Teori

1. Partai Politik

Menurut Carl J. Friedrich, partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut dan mempertahankan pengawasan terhadap pemerintah bagi pimpinan partainya dan berdasarkan pengawasan ini memberikan anggota partainya kemanfaatan yang bersifat ideal dan material.⁴

Menurut Miriam Budiardjo (2008:404) dalam Negara demokratis partai politik menyelenggarakan beberapa fungsi, antara lain:⁵

- a. Sebagai Sarana Komunikasi Politik
- b. Sebagai Sarana Sosialisasi Politik
- c. Sebagai Sarana Rekrutmen Politik
- d. Sebagai Sarana Pengatur Konflik

2. Rekrutmen Politik

a. Pengertian Rekrutmen Politik

Menurut Ramlan Surbakti, rekrutmen politik sebagai seleksi dan pemilihan atau pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem-sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya.⁶

⁴ Miriam Budiardjo. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

⁵ *Ibid.* Hal 403

⁶ Ramlan Surbakti. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia. Hal 188

b. Pola Rekrutmen Politik

Fadillah Putra mengemukakan model yang digunakan partai politik dalam rekrutmen politik antara lain:⁷

1. Rekrutmen Terbuka

Syarat dan prosedur untuk menampilkan seseorang tokoh dapat diketahui secara luas.

2. Rekrutmen Tertutup

Berlawanan dengan cara rekrutmen terbuka. Dalam rekrutmen tertutup, syarat dan prosedur pencalonan tidak dapat secara bebas diketahui umum.

Adapun beberapa pola kecenderungan partai politik dalam melakukan rekrutmen politik terhadap calonnya yakni sebagai berikut (Lili Romli, 2005:93) :

1. *Partisans*

Tipe kecenderungan *Partisans* merupakan pendukung yang kuat, loyalitas tinggi terhadap partai sehingga bisa direkrut untuk menduduki jabatan strategis biasanya kader internal partai.

2. *Compartmentalization*

Proses rekrutmen yang didasarkan pada latar belakang, pendidikan, dan pengalaman organisasi atau kegiatan sosial politik seseorang, misalnya, aktivis LSM.

3. *Immediate Survival*

Proses rekrutmen dilakukan oleh otoritas pemimpin partai tanpa memperhatikan kemampuan orang-orang yang direkrut.

4. *Civil Service Reform*

Proses rekrutmen berdasarkan kemampuan dan loyalitas seorang calon sehingga bisa mendapatkan kedudukan lebih penting atau tinggi.

Menurut Haryanto (1982:47) terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi diantaranya adalah :⁸

1. Pengalaman Organisasi

Pengalaman ini baik selama ia menjadi anggota partai maupun sebelum menjadi anggota partai, karena ini merupakan hal yang mutlak diperlukan oleh seorang calon anggota parlemen dalam menjalankan roda organisasi nantinya.

2. Tingkat Pendidikan

Ditingkat pendidikan baik formal maupun informal, tingkat pendidikan berkaitan erat dengan wawasan seseorang dalam menghadapi sesuatu masalah dan perilaku organisasi. Akan tetapi dalam AD/RT partai manapun tidak dicantumkan kriteria tingkat pendidikan sebagai persyaratan.

3. Pelatihan Kader atau Keterampilan Organisasi

Dimana hal ini merupakan pelatihan untuk memberikan keterampilan dan kemampuan seorang calon anggota didalam mengelola organisasi nantinya.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, menurut Sugiyono metode kualitatif adalah

⁷ Fadillah, Putra. 2003. *Partai Politik dan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal 209

⁸ Haryanto. 1982. *Sistem Politik Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty. Hal 47

suatu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti objek yang alamiah, di mana peneliti adalah instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.⁹

Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Menurut Burhan Bungin format deskriptif bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai variabel yang timbul dimasyarakat yang menjadi objek penelitian itu. Kemudian menarik ke permukaan sebagai suatu ciri atau gambaran tentang kondisi, ataupun variabel tertentu.¹⁰

Penelitian ini dilakukan di tingkat DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Pekanbaru, alasan penulis melakukan penelitian di tingkat DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Pekanbaru adalah karena penulis mengidentifikasi masalah yang ada di lapangan yang telah penulis jabarkan di latar belakang.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Dikarenakan penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, maka teknik pengumpulan data menggunakan

teknik wawancara mendalam dan dokumentasi.

Teknik analisa data yang digunakan adalah model analisa interaktif, yaitu data yang terkumpul akan dianalisis melalui tiga tahap, yaitu mereduksi data, menyajikan data, kemudian menarik kesimpulan. Selain itu, dilakukan pula proses siklus antara tahap-tahap tersebut, sehingga data yang dikumpulkan berhubungan satu dengan yang lainnya secara sistematis.¹¹

B. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Partai Keadilan Sejahtera Kota Pekanbaru Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2019

Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam mekanisme rekrutmen bakal calon anggota Legislatif Partai Keadilan Sejahtera, yaitu sebagai berikut:

1. Tahap Pemilihan
Dalam Partai Keadilan Sejahtera disebut Pemilihan Umum Internal (PUI), melalui Pemilihan Umum Internal ini kemudian mengusulkan nama-nama bakal calon anggota legislatif.
2. Tahap Penjaringan
Tahap ini merupakan proses untuk mendapatkan bakal calon sementara yang diperoleh dari usulan sebelumnya. Apakah seseorang yang diusulkan

⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014) hlm. 9

¹⁰ Bungin, Burhan. 2013. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi Format-format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen dan Pemasaran*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup. Hal 48

¹¹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014) hlm. 345

tersebut berhak ke tahap selanjutnya atau tidak.

3. Tahap Penyaringan dan Seleksi
Kemudian pada tahap ini dilakukan penyaringan dan penyeleksian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang ada yang telah ditetapkan oleh partai.
4. Tahap Verifikasi
Tahap verifikasi adalah proses berdasarkan kelengkapan persyaratan administratif. Jika bakal calon yang telah lolos tahap sebelumnya, maka harus melengkapi persyaratan administratif yang telah ditetapkan.
5. Penetapan Calon beserta Nomor Urutnya
Tahapan yang terakhir adalah penetapan calon beserta nomor urutnya. Tahap ini merupakan tahap terakhir bagi bakal calon anggota legislatif untuk didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum.

Partai Keadilan Sejahtera dalam pelaksanaan rekrutmen calon anggota legislatif untuk pemilu 2019 menggunakan sistem rekrutmen terbuka, karena semua masyarakat yang memenuhi syarat dapat dipilih sebagai bakal calon anggota legislatif. Masyarakat tersebut tidak dapat mendaftar secara pribadi ke Partai Keadilan Sejahtera, namun kader dari setiap daerah pemilihan akan melakukan pencarian di wilayahnya, dalam artian seluruh masyarakat tidak memiliki hak untuk mendaftar sebagai calon anggota legislatif.

Kemudian dalam melakukan rekrutmen bakal calon anggota legislatif yang dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera, maka penulis jabarkan menggunakan teori kecenderungan partai politik dalam melakukan rekrutmen menurut Lili Romli (2005:93).

1. Tipe *Partisans*

Merupakan pendukung yang kuat, loyalitas tinggi terhadap partai sehingga bisa direkrut untuk menduduki jabatan strategis. Tipe ini lebih mengedepankan kader-kader partai yang bisa direkrut untuk menjadi calon anggota legislatif. Artinya pada kecenderungan ini, indikator yang dilihat adalah dari sisi loyalitas dan pendukung terutama yang berkaitan dengan kader-kader partai.

Tipe *Partisans* dalam proses rekrutmen merupakan tipe dominan yang hampir digunakan di semua partai politik. Begitu juga di Partai PKS. Dalam proses rekrutmen yang dilakukan oleh PKS dalam menyiapkan kader-kadernya untuk dapat duduk di kursi parlemen diantaranya adalah melihat dari status kadernya yang sudah pada jenjang kader inti. Dimana kader inti itu merupakan pendukung yang kuat, kader yang loyalitasnya tinggi dan teruji.

Tabel 3.1

Nama-nama Calon anggota legislatif DPD PKS Kota Pekanbaru yang mencalon pada periode 2014-2019 dan periode 2019-2024

No	Nama	Dapil	Status
1.	Muhammad Isa Lahamid	Dapil 1	Caleg

2.	Firmansyah, Lc	Dapil 2	Caleg
3.	Amris	Dapil 3	Caleg
4.	Hamdani Ms, S.IP	Dapil 4	Caleg
5.	Hafifah, S.Ag	Dapil 4	Caleg
6.	Mulyadi, AMD	Dapil 5	Incumbent
7.	Yasser Hamidy, SPI	Dapil 5	Caleg
8.	Rois S.Ag	Dapil 6	Caleg
9.	Drg. Fatimah	Dapil 6	Caleg

Sumber: Dokumen DPD PKS Kota Pekanbaru 2019

Dari tabel 3.1 di atas, dapat diketahui bahwa calon anggota legislatif pada tahun 2019 ini juga pernah menjadi calon anggota legislatif pada tahun 2014 yang lalu, dimana mereka merupakan kader PKS yang bisa dibilang punya loyalitas tinggi terhadap partai, sehingga mereka dipilih dan mampu menjalankan amanah yang telah diberikan oleh partai.

2. Tipe *Compartmentalization*

Merupakan proses rekrutmen yang didasarkan pada latar belakang, pendidikan dan pengalaman organisasi atau kegiatan sosial politik seseorang. Tipe ini sebenarnya hanya menjadi nilai tambah saja bagi kader yang akan dicalonkan menjadi anggota legislatif.

Tipe ini bisa dikatakan penting jika diimbangi dengan loyalitas serta kapasitas kader dalam kemapanan finansial dan basis massa yang kuat. Tapi jika tipe ini berdiri sendiri, maka bisa dikatakan tipe ini hanya menjadi nilai tambah saja dalam proses rekrutmen politik di partai politik.

Jika melihat dari tipe *Compartmentalization*, partai PKS

menggunakan tipe ini hanya untuk sebagai pertimbangan saja.

Tabel 3.2
Profil calon anggota legislatif
DPD PKS Kota Pekanbaru tahun
2019

No	Profil	Int	Eks	Total
1.	Pengusaha	9	8	17
2.	Tokoh Masyarakat	17	10	27
	Jumlah	26	18	44

Sumber: Data olahan peneliti 2019

Berdasarkan tabel 3.2 di atas, dapat diketahui bahwa di internal PKS lebih didominasi oleh calon anggota legislatif dari tokoh masyarakat yaitu sebanyak 17 orang, kemudian pengusaha 9 orang, sedangkan calon anggota legislatif dari eksternal juga didominasi oleh tokoh masyarakat yaitu 10 orang, dan dari pengusaha 8 orang.

3. Tipe *Immediate Survival*

Merupakan proses rekrutmen yang dilakukan oleh otoritas pemimpin partai tanpa memperhatikan kemampuan orang-orang yang akan direkrut. Tipe ini tidak digunakan oleh partai PKS dalam proses rekrutmen calon anggota legislatifnya, kecuali hanya pada hal-hal tertentu yang bersifat krusial dan urgen.

jika tipe ini digunakan oleh partai PKS, maka memiliki beberapa konsekuensi konflik di tubuh partai itu sendiri. Harus diimbangi dengan nilai loyalitas tinggi para anggota atau kader dalam mematuhi kebijakan pimpinan partai. Kalau dilihat partai PKS merupakan partai berbasis kader, maka akan meminimalisir adanya konflik internal di tubuh PKS. Ini

didukung dengan adanya proses pembinaan yang terpadu dan rutin yang dilaksanakan oleh PKS. Terdapat doktrin yang kuat yang disampaikan kepada para pengurus partai dan para kader terhadap kebijakan-kebijakan pimpinan partai. Mereka senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai islam, serta istilah *sami'na waato'na* yang tepat untuk menggambarkan tingkat loyalitas para kader PKS terhadap kebijakan pimpinan partai.

4. Tipe Civil Service Reform

Merupakan proses rekrutmen berdasarkan kemampuan dan loyalitas seorang calon sehingga bisa mendapatkan kedudukan lebih penting atau tinggi. Untuk tipe *Civil Service Reform* ini merupakan tipe yang menjurus kepada loyalitas dan kemampuan seseorang calon legislatif.

Kemampuan dan loyalitas individu akan dijadikan pertimbangan dalam proses rekrutmen untuk calon legislatif yang akan diusung oleh partai PKS, dan tipe ini biasanya digunakan untuk merekrut caleg dari non kader. Ini dikarenakan caleg dari non kader harus mempunyai kesiapan sebagai calon anggota legislatif nantinya.

Partai PKS juga menggunakan tipe ini untuk merekrut calon anggota legislatifnya, terutama caleg dari non kader. Ini dikarenakan caleg non kader harus punya kesiapan yang matang Sehingga orang-orang yang direkrut oleh partai PKS memang orang-orang yang berkualitas untuk duduk di parlemen nantinya. Disamping itu caleg dari non kader ini juga merupakan pendukung partai sebelum menjadi anggota partai PKS.

Tabel 3.3
Tipe Rekrutmen Calon Anggota
Legislatif DPD PKS Kota
Pekanbaru 2019

No	Tipe	In	Ek	(%)
1.	<i>Partisans</i>	26	-	59,1%
2.	<i>Compartmentalization</i>	-	-	-
3.	<i>Immediate Survival</i>	-	-	-
4.	<i>Civil Service Reform</i>	-	18	40,1%

Sumber: data olahan peneliti 2019

Berdasarkan tabel 3.3 di atas, dapat diketahui bahwa memang rekrutmen semua calon anggota legislatif dari internal partai PKS menggunakan tipe *partisans*, dan tipe *compartmentalization* hanya digunakan oleh partai PKS sebagai pertimbangan saja. Hal ini mengindikasikan bahwa tipe *compartmentalization* menjadi nilai plus bagi calon anggota legislatif internal. Kemudian tipe *Immediate Survival* tidak digunakan oleh PKS dalam rekrutmennya, kecuali dalam hal yang krusial dan urgen. Sedangkan tipe *civil service reform* digunakan oleh partai PKS, terutama untuk merekrut caleg dari non kader yang punya kemampuan dan mau bergabung dengan PKS.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Dalam Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Partai Keadilan Sejahtera Kota Pekanbaru

Faktor yang mempengaruhi dalam rekrutmen politik ada 2, yaitu faktor penghambat dan faktor pendukung. Dimana kedua faktor ini menjadi hal yang perlu diperhatikan

oleh partai politik dalam melakukan rekrutmen calon anggota legislatifnya.

a. Faktor Pendukung

1. Latar Belakang

Setiap bakal calon yang akan diusulkan setidaknya mempunyai latar belakang yang baik misalnya, tokoh masyarakat yang memang sudah dikenal di internal PKS dan masyarakat. Karena ini merupakan tanggung jawab partai yang melahirkan anggota-anggota legislatif yang berkualitas. Maka, sudah seharusnya partai melakukan penyeleksian terhadap bakal calon yang akan diusulkan untuk menjadi calon anggota legislatif.

2. Pengalaman Politik

Setiap bakal calon yang mempunyai pengalaman politik misalnya, aktif di organisasi, maka akan di prioritaskan, dan partai PKS juga sangat konsisten dengan politik dakwahnya yang membuat setiap bakal calon yang terpilih akan diberi amanah oleh partai PKS itu sendiri.

3. Finansial

Hal ini menjadi penunjang bagi setiap bakal calon yang terpilih. Ketika nantinya pada waktu kampanye, maka akan dibutuhkan dana untuk keperluan kampanye tersebut. Namun hal ini tidak menjadi landasan bagi calon anggota legislatif dari Partai Keadilan Sejahtera, karena mengingat partai ini merupakan partai kader yang mana setiap seseorang yang tergabung dalam kader partai akan siap membantu dalam memperoleh dukungan dari

masyarakat untuk calon anggota legislatifnya.

b. Faktor Penghambat

1. Pekerjaan

Salah satu faktor penghambat bakal calon yang diusulkan adalah faktor pekerjaan, dimana setiap orang yang telah diatur dalam pasal 240 Undang-Undang nomor 7 tentang Pemilu yang akan menjadi calon anggota legislatif harus mundur dari jabatannya, atau bakal calon yang sudah melakukan kontrak dengan perusahaan, sehingga hal inilah yang menjadi penghambat bagi Partai Keadilan Sejahtera dalam merekrut bakal calon legislatifnya.

2. Domisili Bakal Calon

domisili bakal calon yang terletak di daerah yang sama juga menjadi penghambat partai PKS dalam melakukan rekrutmen calon anggota legislatifnya. Sehingga sulit untuk memperoleh suara di daerah yang menjadi basis masa dari calon anggota legislatif partai lain. Mengingat persaingan antar calon anggota legislatif di PKS itu sendiri dan juga persaingan dari calon anggota legislatif partai lain, seharusnya domisili bakal calon PKS harus tersebar merata di setiap kelurahan untuk mempermudah mendapatkan perolehan suara di masing-masing kelurahan tersebut.

3. Keterwakilan Perempuan

Syarat minimum keterwakilan perempuan adalah 30%, dan yang menjadi penghambat adalah

sulitnya menemukan bakal calon dari perempuan yang akan diusulkan, sehingga dengan kata lain Partai harus mencalonkan bakal calon perempuan dari eksternal partai

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan perumusan masalah penelitian, maka peneliti melakukan penyimpulan terhadap hasil penelitian dan temuan-temuan di lapangan, yaitu:

1. Rekrutmen Partai Keadilan Sejahtera lebih dominan menggunakan tipe *partisans* dan *Civil Service Reform* dalam menjalankan proses rekrutmen calon anggota legislatifnya. Ini memperkuat proses yang sudah berjalan di internal Partai Keadilan Sejahtera. Kemudian tipe *Compartmentalization* hanya sebagai pertimbangan oleh Partai Keadilan Sejahtera. Hal ini mengindikasikan bahwa tipe *compartmentalization* menjadi nilai plus bagi calon anggota legislatif internal. Rekrutmen calon anggota legislatif Partai Keadilan Sejahtera Kota Pekanbaru pada pemilihan legislatif tahun 2019 bisa dikatakan baik, sehingga mampu melahirkan kader-kader dan simpatisan yang berkualitas untuk dijadikan calon anggota legislatif.
2. Proses Rekrutmen Calon Anggota legislatif yang dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera harus melalui tahapan-tahapan dan juga pertimbangan-pertimbangan dari berbagai aspek. Partai Keadilan Sejahtera dalam merekrut calon anggota legislatifnya bertentangan

dengan AD/ARTnya sendiri yang menyebutkan bahwa dalam rekrutmen calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus memperhatikan jenjang keanggotaannya. Namun kenyataannya, Partai Keadilan Sejahtera masih merekrut dari non kader. Tentunya hal tersebut tidak dipermasalahkan dalam internal Partai Keadilan Sejahtera, karena semua calon yang diusulkan harus bersedia menjadi anggota Partai Keadilan Sejahtera untuk kedepannya.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi rekrutmen calon anggota legislatif Partai Keadilan Sejahtera, yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Sebagai faktor pendukung dalam rekrutmen calon anggota legislatif adalah latar belakang, pengalaman politik, dan finansial. Sedangkan faktor penghambat adalah pekerjaan, domisili bakal calon, dan keterwakilan perempuan.

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian yang berjudul strategi Partai Keadilan Sejahtera dalam rekrutmen calon anggota legislatif Kota Pekanbaru pada pemilihan legislatif tahun 2019, penulis memberikan saran-saran yang sifatnya membantu yaitu sebagai berikut:

1. Terkait dengan proses rekrutmen yang digunakan oleh partai PKS, memang sudah jelas alur dan prosedurnya. Namun, untuk kedepannya harus lebih efisien lagi dan sesuai dengan AD/ART PKS tentunya, terutama soal bakal calon

yang diusulkan dari eksternal untuk menjadi calon anggota legislatifnya. Harus ada pembinaan terlebih dahulu dari PKS sebelum ditetapkan menjadi bakal calon.

2. Terkait kecenderungan rekrutmen partai PKS, walaupun partai PKS lebih cenderung menggunakan tipe *Partisans*, namun harus di seimbangkan dengan tipe *compartmentalization*, dimana tipe ini tidak hanya dijadikan bahan pertimbangan saja, tapi menjadi suatu keharusan bagi seorang calon anggota legislatif tentunya.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Bungin, Burhan. 2013. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi Format-format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen dan Pemasaran*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup
- Cholisin dan Nasiwan. 2012. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Yogyakarta: Penerbit Ombak
- Gaffar, Affan. 1999. *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fadilah. Putra. 2003. *Partai Politik dan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Haris, Syamsuddin. 2005. *Pemilu Langsung Ditengah Oligarki: Proses Nominasi Dan Seleksi Calon Legislatif Pemilu 2004*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Haryanto. 1982. *Sistem Politik Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty
- J. Piliang, Indra. 2013. *Mengenal Teori-Teori Politik*. Bandung : Nusa Cendikia.
- Marijan, Kacung. 2010. *Sistem Politik Indonesia Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*. Jakarta: Kencana
- Muhtadi, Burhanuddin. 2012. *Dilema PKS :Suara dan Syariah*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia
- Romli, Lili. 2005. *Pemilihan Presiden Langsung 2004 Dan Konsolidasi Demokrasi di Indonesia*. Jakarta. LIPI
- Schorder, Peter. 2009. *Strategi Politik Edisi Revisi Untuk Pemilu 2009*. Jakarta: Friedrich-Naumann-Stiftung fuer die Freiheit
- Subagyo, Firman. 2009. *Menata Partai Politik*. Jakarta : Wahana Semesta Intermedia
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia

Skripsi dan Jurnal

- Biyanca Duta Pratama. *Rekrutmen Politik Partai Demokrat Tahun 2013 Di Kabupaten Kuantan Singing*. Skripsi S1 Jurusan Ilmu Pemerintahan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Riau. 2015
- Allan Yanika. *Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Partai Amanat Nasional Provinsi Riau Periode 2014-2019*. Jom FISIP Vol. 1 No. 2 Oktober 2014

Okky Singgih Laksono Waskita Aji,
Hasyim Asy'ari, Lita Tyesta
A.L.W, *Optimalisasi Tata Cara
Partai Politik Dalam Rekrutmen
Calon Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Untuk Mewujudkan
Pemerintahan Yang Baik (Good
Governance) Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2012.*
(Diponegoro Law Journal Volume
5, Nomor 4, Tahun 2016.

Dokumen

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011
Tentang Partai Politik.

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga (AD/ART) Partai Keadilan
Sejahtera. Tahun 2013.

Berita

Estu Suryowati, *Banyak Bakal Caleg
Non-Kader Partai, Bukti
Popularitas Masih Faktor Utama.*
Diakses dari
<http://nasional.kompas.com/read/2017/12/11/21130851/banyak-bakal-caleg-non-kader-partai-bukti-popularitas-masih-faktor-utama>.
pada tanggal 02 desember 2013
pukul 14.29